

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I: THE URGENCY OF KNOWLEDGE MAPPING ON <i>CROSS-BORDERGOVERNANCE</i></b> .....	<b>3</b>
Pendahuluan .....	3
Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian .....	10
Tujuan Dan Metodologi Penelitian.....	11
Kerangka Kajian .....	13
Cakupan Kajian.....	21
Skema Kerja .....	23
<b>BAB II: REVIEW KAJIAN DAN KONTEKS KEBIJAKAN CROSS BORDER <i>GOVERNANCE</i></b> .....	<b>24</b>
<i>Rethinking The Border: Dialektika Perkembangan Kajian Border</i> .....	25
Review Konteks Kebijakan <i>Cross-BorderGovernance</i> Indonesia- Malaysia.....	35
Sosek-Malindo .....	35
Masterplan <i>ASEAN Community</i> (MPAC).....	38
Kebutuhan Memetakan Keberagaman Rezim Dalam Proses Governance Pengelolaan Perbatasan.....	46
<b>BAB III: KONDISI <i>CROSS BORDER GOVERNANCE</i> DI KALBAR- SARAWAK</b> .....	<b>47</b>
Konektivitas Perdagangan .....	47
Perdagangan Formal .....	51
Perdagangan Informal/Illegal kalbar-Serawak .....	55
Konektivitas Berbasis Kesukuan ( <i>Kinship</i> ) .....	57
Siapa Suku Dayak?.....	57
Connectivity Antar Dayak di Perbatasan.....	58
Hukum Adat.....	61
Penerapan Pas Lintas Batas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Evolusi Pos Lintas Batas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Heart of Borneo .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Sosek Malindo .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV: IDENTIFIKASI REGIME DAN INTERAKSI ANTAR REGIME DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA</b> .....	<b>74</b>

Local <i>Cross Borders</i> Culture.....	74
Ethnic based <i>Cross borders</i> Activities .....	74
Issue Based <i>Cross borders</i> Cultural Activities.....	77
Aktifitas Lintas Batas Berbasis Keagamaan .....	79
Local <i>Cross Borders</i> Political Clout .....	79
Politik Identitas Dayak .....	79
Politik Lingkungan .....	83
Market Forces and Trade Flows.....	84
Institutions and Multi- <i>Governance</i> System .....	87
Peta Pengetahuan, Akumulasi Pengetahuan, dan <i>Bordering Practices</i> .....	91
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN .....</b>	<b>94</b>
Pengetahuan dan Konstruksi Perbatasan .....	94
Implikasi Kebijakan .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## THE URGENCY OF KNOWLEDGE MAPPING ON *CROSS-BORDERGOVERNANCE*

### PENDAHULUAN

Perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa. Ia menjadi lokus (dis) koneksitas antar negara-bangsa sekaligus penanda dari mata rantai legitimasi negara bangsa. Posisi fisik-strategis Indonesia yang dalam bentangan geopolitik memiliki wilayah yang tidak kurang dari 8,1 juta km<sup>2</sup>, sebaran pulau kurang lebih 17.499 pulau dan panjang garis pantai yang lebih dari 80.000 kilometer serta perlintasan garis perbatasan darat sekitar 29.141 km. Posisi ini meletakkan Indonesia secara langsung berbatasan dengan sepuluh negara (10) tetangga; Singapore, Malaysia, Philippines, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste and the Republic of Palau.<sup>1</sup> Sebagian besar dari ragam Negara tersebut telah berafiliasi secara regional dan membentuk upaya bersama untuk proses regionalisasi.

Kendati posisi Indonesia yang strategis, operasionalisasi serius terhadap tata kelola lintas batas belum diletakkan sebagai prioritas. Padahal kemampuan (*governability*) negara salah satunya dapat dilihat dari bagaimana kawasan perbatasannya dikelola. Di kawasan perbatasan ini perhatian pemerintah tidaklah memadai. Kawasan perbatasan menjadi *concern* nasional hanya ketika ada sengketa perbatasan antar negara

---

<sup>1</sup> Indonesia Defence White Paper. (2008). Ministry of State Defense, Jakarta. p.55. see also in article 5, Law No. 43, 2008 on State Territory.

terjadi<sup>2</sup>. Dengan sejumlah pengecualian, penanganan masalah perbatasan dilakukan secara reaktif.<sup>3</sup> Karenanya, kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain pada umumnya merupakan wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah tertinggal atau terisolasi atau malah keduanya.<sup>4</sup> Dalam kebanyakan kasus, wilayah perbatasan bukan hanya kurang mendapatkan perhatian pemerintah pusat, tapi juga ditandai oleh ketidak-hadiran negara secara efektif. Kalaupun negara hadir, ia cenderung menunjukkan wajahnya yang tidak ramah melalui gelar pasukan<sup>5</sup>.

Kapasitas ini terlihat dari cara negara-bangsa dalam memproduksi dan mendistribusikan pemberdayaan (*em-power-ing*) kawasan perbatasan, sehingga kuat atau lemahnya basis legitimasi negara dimata warga yang hidup keseharian dalam lintas-batas ini akan diujikan. Eksistensi kedaulatan dan kontrol teritorial dan penduduk (*control over the territory, control over the people*) telah membawa perbatasan sebagai entitas konflik antar dua negara, bahkan tidak jarang menjadi indikator

---

<sup>2</sup> Indonesia berbatasan darat langsung dengan Malaysia sepanjang 857 Km di Propinsi Kalimantan Barat di sebaran Kabupaten; Sambas, Bengkayang, Sangu, Sintang dan Kapuas Hulu, demikian juga Propinsi Kalimantan Timur di Kutai Barat, Malinau, Nunukan. Perbatasan dengan Papua Nugini meliputi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke.

<sup>3</sup> Sikap reaktif ini terlihat ketika munculnya keputusan mahkamah internasional tentang sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan menuai reaksi politik nasional baik dari kalangan sipil maupun militer.

<sup>4</sup> Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Boven Digoel, Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, 2009.

<sup>5</sup> Peran ini secara tradisional yang dianut era 1960-an menunjukkan negara dalam menjaga kawasan perbatasan sekedar merujuk pada pemahaman teritorial dan diwujudkan dalam representasi kekuatan militer atau kepolisian yang menjadi petanda aktor-aktor penjaga tapal batas. Justru pendekatan ini "mengeluarkan" masyarakat sebagai elemen kunci dalam mendinamisasi pembangunan di perbatasan. Bagi pendekatan yang baru, justru pembangunan manusia menjadi kunci imbal balik dari kehadiran keamanan. Gugatan secara konseptual muncul dengan mempertanyakan " *who is responsible for security (to secure the border ) and what is its subject - a macro-region, the state or one or more of its parts*. Kolossov, Vladimir, " *Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches*", *Geopolitics*, 10:4, 2005, hal, 624.

mengukur derajat governability. Merujuk pada argumentasi dari Robert I. Rotberg (2002: 85-90);

*“ Nation states fail because they can no longer delivery positive political goods to their people. Their governments lose legitimacy and, in the eyes and hearts of a growing plurality of its citizens, the nation-state itself becomes illegitimate. A nation-state also fails when it loses a basic legitimacy—when its nominal borders become irrelevant and when one or more groups seek autonomous control within one or more parts of the national territory or, sometimes, even across its borders”.*

Pengalaman kegagalan negara (*failed states*) menuju *collapsed states* yang terjadi di negara-negara yang dilanda konflik bersenjata seperti di kawasan Afrika maupun timur tengah bertumpu dari tergerusnya kapasitas negara. Catatan Roberg dalam satu dekade lampau Robert I Roberg (2003: 16) menjadi penanda bagi satu dekade kedepan (2023) kerisauan negara-negara seperti Indonesia, Colombia, Sri Lanka, and Zimbabwe bergerak secara lamban tapi pasti menuju pada negara-bangsa dengan tingkat resiko tinggi mendekati negara gagal. Tantangan regional dan proses institusionalisasi demokrasi untuk membangun derajat legitimasi yang lebih tinggi. Pasca tiga dekade regime otoritarian (1965-1998) menuju tiga dekade kedepan, transisional kearah demokrasi masih memendam masalah fundamental dalam reproduksi “ruang kekuasaan”.

Kekuasaan (power) yang terlalu lama di konsolidasikan di pusat telah mengalami proses teknokrasi sedemikian rupa sehingga dimensi kekuasaan dimaknai semata sebagai dimensi distribusi (power

distribution) yang bersifat *negative sum-game*. Kekuasaan di level nasional yang terdesentralisasikan diartikan semata sebagai pengurangan jumlah konsolidasi kekuasaan di tingkat nasional. Sehingga lokalitas yang kuat dipahami sebagai ancaman. Sedangkan kekuasaan negara dalam pengertian dimensi generativenya - fasilitasi untuk mereproduksi kekuasaan guna menumbuhkan kekuasaan di lokus rakyat semisal (empower-ing) belum dipahami sebagai instrumen pokok. Sehingga dimensi kekuasaan yang generative dimaknai arena yang feasible dibangun secara *positive sum-game* belum nampak berdaya. Asumsi sederhana, jika rakyat kuat maka semesta masyarakat akan membantu pemerintah dalam pencapaian efektifitas kebijakan negara (Mas'ood, Mochtar, negara, birokrasi, capital: 187).

Dari kacamata ini, pembangunan dalam arti luas di kawasan Asia baik di Asia Pasifik atau di Asia Tenggara pada khususnya hanya menunjukkan satu pergerakan semata dari penguatan aspek ekonomi *an-sich*. Sedangkan aspek politik dan kebudayaan menunjukkan fenomena yang stagnan. Fenomena ini dapat diperiksa dari pembangunan demokrasi politik yang hanya fokus pada aspek electoral democracy semata sedangkan demokrasi yang lebih substantif telah jauh tertinggal. Dan pembangunan identitas nasional menjadi isu yang labil. Oleh karenanya pembangunan politik melalui rekognisi “popular sovereignty” semestinya mulai dikembangkan. Sehingga bentuk-bentuk baru dari legitimasi politik di Asia Tenggara dapat dirumuskan dan lebih membumi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Muthia Alagapha, Keynote Speaker at the 3<sup>rd</sup> International Conference on Asia-Pacific Studies : Changes and Challenges, Institute of China and Asia-Pacific Studies, National Sun Yat-Sen University, Khaosiung-Taiwan, 7-9 November 2013

Orientasi kebijakan luar negeri di kawasan Asia Tenggara dewasa ini didominasi oleh dinamika kepentingan domestik. Alagapha menilai bahwa paradigma keamanan di Asia dipengaruhi oleh mainstream *realist security paradigm*. Sehingga fokus negara dalam for internasional sangat difokuskan pada perlindungan basis survavilitas kedaulatan dan teritorial dalam bentuk kekuatan militer. Sedangkan masalah sejatinya didalam masing-masing negara bangsa di Asia – termasuk Indonesia dan Malaysia adalah pertanyaan tentang situasi domestik masing-masing negara. Bagaimana pengelolaan tentang konflik dan ketegangan regional (aceh, papua) dan bagaimana pengelolaan tentang konflik dan ketegangan identitas nasional (etnisitas di kalimantan, maupun serawak). Tantangan dan perubahan masa depan Asia dalam merancang desain keamanan yang luas sangat perlu untuk memperhatikan dinamika dan perubahan di ranah lokal karena keamanan pada hakekatnya adalah rancang bangun dari perlindungan komunitas politik (*Security is about the protection of the political community*).<sup>7</sup>

Dinamika politik komunitas di lintas batas darat menunjukkan ke-khas-an fenomena bahwa kecenderungan absensi Negara dalam tata kelola lintas karena lemahnya pembacaan dinamika *regime* politik yang bekerja. Regime yang dimaksud adalah tata nilai, norma, kepercayaan maupun corak pelebagaan dari operasionalisasi relasi politik diperbatasan. Regime politik formal kenegaraan maupun informal yang melibatkan jejaring relasi social – politik dari kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan ini. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa regime politik informal ditengah masyarakat yang terbangun secara

---

<sup>7</sup>Ibid.

historis telah exist mendahului regime politik formal Negara menjadi komplikasi legitimasi dari entitas politik ruang dari Negara-bangsa<sup>8</sup>.

Kebijakan sering kali kehilangan konteks dan tidak memiliki sambungan dengan logika praktek keseharian masyarakat lintas-batas. Bagi mereka perbatasan adalah abstrak dan semu karena ikatan-ikatan primordial lebih menjadi ke-primer-an dalam interaksi sosial dibandingkan dengan ikatan-ikatan komunitas politik ke-nasional-an. Absen-nya kebijakan nasional dalam melihat konteks perbatasan dimaknai pula sebagai lemahnya proses kebijakan nasional manakala dihadapkan dengan *kontestasi dan koneksitas* lokal yang bekerja dalam logika regime politik lokal. Kuat dan lemahnya regime politik lokal yang beroperasi akan menentukan basis loyalitas, identitas dan alamat kebijakan nasional. Bahkan tak jarang kebijakan publik di bajak dilevel lokal melalui cara kerja ethno-cratic politic yang mementingkan elit lokal untuk kepentingan elit lokal semata.<sup>9</sup>

Kembali pada unit-interkoneksi, kawasan Asia maupun belahan kawasan non-Asia lainnya, unit politik berupa suku atau hubungan kekerabatan (*kinship*), unit social ekonomi kemasyarakatan atau bentuk *proto-nasionalism* lainnya, telah menjadi akar historis yang membentuk persamaan nasib atau bahkan solidaritas sosial. Sering solidaritas ini melewati batas formal Negara yang meletakkan legalitas garis perbatasan yang membelah atau memisahkan unitas politik tradisional ini. Konsekuensinya, legitimasi regime politik formal kenegaraan bekerjasama, berkoeksistensi atau melebur dengan corak relasional yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam konteks ini, Indonesia disatu sisi

---

<sup>8</sup>Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Muyu Pemekaran Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. 2006

<sup>9</sup> Julie Mostov, *Soft Borders: rethinking sovereignty and democracy*, NY: Palgrave MacMillan, 2008.



sebagai satu Negara-bangsa yang lahir dari perjuangan panjang dekolonisasi dan pewarisan territorial politik pasca colonial dalam proses penegeraan dan pembangsaan, dan disisi lain berhadapan dengan proses fiksasi garis batas dengan Negara tetangga.

Di era globalisasi sekarang, garis batas menjadi entitas yang memudar. Tatanan global menghendaki pergerakan internsif dari manusia, barang dan jasa yang melintasi kawasan perbatasan. Tatanan politik ekonomi global juga menghendaki agar setiap negara semakin membuka diri terhadap hal itu melalui berbagai bentuk kebijakan yang bernafaskan liberalisasi. Kesiapan Indonesia mengikuti aturan internasional yang semakin liberal tentunya meningkatkan beban dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan perbatasan secara lebih seksama<sup>10</sup>. Sehingga formal dan informal, legal dan illegal menjadi entitas yang *contested* dari kacamata nasional. Akan tetapi se-iring dengan globalisasi juga, proses regionalisasi sebagai kekuatan ekonomi eksternal seperti ASEAN mulai menempatkan diri sebagai entitas baru. ASEAN adalah salah satu corak regionalisasi yang tumbuh dan berkembang dari perkembangan kontestasi blok-blok politik masa lalu dalam skema perang dingin dan mengkreasi diri sebagai pola regionalisasi yang unik melalui prinsip non-intervensi diantara anggotanya. Melalui pelembagaan ini, setahap demi setahap institusi supra-negara bangsa ini telah mendorong kesepahaman untuk merancang sebuah masyarakat ASEAN baru. Tahun 2015, melalui roadmap ASEAN Connectivity adalah milestone utama dari

---

<sup>10</sup>Keseksamaan dalam tata kelola perbatasan dapat dimulai dengan meletakkan kembali fungsi kewilayahan dalam sejumlah referensi utama. Lihat, Liam O'do and Cathal McCall, " *The significance of the Border Dimension And For Promoting Peace And Reconsiliation* " Mapping Frontiers Plotting Pathways, Working Papers No. 5 2006, hal, 5; lihat juga, KJ Rankin and Schofield, " *The Trouble Historiography of Classical Boundary Terminology*", Mapping Frontiers, Plotting Pathways MFPP Ancillary paper No. 2, 2004, hal, 5. Anggoro, Kusnanto, Ph.D, " *Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Dan Keamanan*", Jurnal CSIS, Jakarta, 2005.

kelanjutan mimpi pembentukan ASEAN community. Terang dalam skema ini lapis-lapis governance di level intra-state maupun inter-state di tapal batas, kembali lagi akan turut menentukan wajah tata kelola perbatasan.

Akhirnya, kawasan perbatasan semakin bermakna justru dalam denyut globalisasi yang meniadakan sekat batas negara. ia telah tumbuh sendiri sebagai arena pertarungan baru dari kepentingan nasional, bahkan survivalitas sebuah bangsa. Lebih lanjut, dalam dinamika dan konteks ini, tata kelola lintas-batas (*cross-border governance*) menjadi instrument untuk mengukur pola dan derajat kontestasi sekaligus koneksitas antar negara. Dalam studi kasus Indonesia – Malaysia di lintas-batas Kalimantan Barat – Serawak, identifikasi medium interaksi perbatasan dalam wujud pluralitas institusi (lembaga, norms, ide, value, dll) yang bekerja di kawasan ini menjadi lokus penelitian yang strategis untuk memetakan dinamika pengetahuan yang bekerja dan menjadi modal dasar pencarian *cross-border governance* model yang relevan dimasa mendatang. Sehingga, Indonesia, Malaysia maupun skema regional harus mulai mengidentifikasi “pluralitas medium interaksi perbatasan” untuk memahami *framework* yang bekerja dan re-formulasi model tata kelola lintas-batas (*cross-border governance* model) yang bisa diandalkan. Dengannya, dinamika domestik maupun internasional yang berlangsung di kawasan lintas-perbatasan dapat terkelola dengan baik.

## **PERMASALAHAN DAN PERTANYAAN PENELITIAN**

Permasalahan penelitian yang hendak dicermati di sini adalah bagaimana mengelola perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar dan, pada saat yang sama, negara bukan lagi menjadi aktor dominan dalam penentuan kebijakan, termasuk

kebijakan terkait perbatasan dan pengelolaannya. Dalam peta permasalahan besar tersebut, kajian ini ingin berkontribusi dengan menjawab pertanyaan dasar:

- Rezim dan pengetahuan apa saja yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktifitas lintas-batas RI-Malaysia di Kalimantan Barat-Serawak?
- Bagaimana relasi antar rezim tersebut dalam dinamika pengelolaan lintas batas RI- Malaysia di Kalimantan Barat-Serawak?

## **TUJUAN DAN METODOLOGI PENELITIAN**

Kajian lintas-batas di Indonesia belum lama berkembang. Hal ini tentu saja karena kebijakan pemerintah sebelumnya yang kurang memperhatikan wilayah perbatasan. Perubahan arah kebijakan pengelolaan yang dilakukan pemerintah, yang ingin menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda dan bukan lagi halaman belakang negara, perlu disambut dengan baik. Oleh sebab itu pemerintah membutuhkan dukungan akademik dari kampus dalam pengembangan kawasan perbatasan. Agar perbatasan benar-benar menjadi wilayah yang maju, sejahtera dan aman, hidup berdampingan dengan negara lain. Komunitas akademis, seperti halnya Fisipol UGM sendiri, menggunakan penelitian ini sebagai instrumen untuk merancang kehiraupan publik akademis terhadap kawasan perbatasan yang telah lama terbengkalai.

Tujuan penelitian dasar penelitian ini adalah; (1) Membangun frameworks tata kelola lintas (*cross-border governance*) yang berbasis pada pemetaan pengetahuan yang telah ada dan realitas lapangan, (2) Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Badan

Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan (3) Terbentuknya *working group on border studies* baik di internal UGM maupun bersama pihak luar.

Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan lokasi penelitian di Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian interdisipliner dimana data akan di kumpulkan dengan tiga cara, (1) *desk study*, dilakukan untuk melihat perkembangan penelitian maupun regulasi yang mengatur permasalahan perbatasan. Desk study dilakukan sebagai aktivitas pembuka program. Kegiatan desk study dilakukan untuk mengakumulasi pengetahuan mengenai konsep atau pemahaman mengenai isu kebijakan pengelolaan perbatasan. Kegiatan desk study dapat dilakukan melalui pengumpulan data pustaka, baik, buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya, hingga dokumen kebijakan. Dalam proses desk study juga dirumuskan instrumentasi data yang menjadi basis untuk melakukan analisis data pustaka/literatur review. Output yang diharapkan adalah tipologi pengelolaan perbatasan/*border governance*. Hasil desk study dalam tahap ini akan dibukukan dalam satu buah buku.

(2) *In-depth interview dalam penelitian lapangan* akan dilakukan dengan mewawancarai pemangku kebijakan dan aktor-aktor lainnya yang terkait dengan pengelolaan perbatasan. Interview ini akan dilakukan di Serawak-Kalimantan Barat yang menjadi lokasi penelitian dengan melakukan assessment dan wawancara tentang medium interaksi perbatasan.

Dan (3) *FGD*. Skema ini dirancang untuk melibatkan secara langsung proses penelitian dengan aktifitas empiris inisiasi *working group on border studies*. Permasalahan perbatasan adalah permasalahan yang kompleks dan untuk melihatnya memerlukan banyak sudut pandangkeilmuan. Selama ini permasalahan perbatasan kerap dilihat

dengan kaca mata yang berbeda-beda, dan jarang dilihat melalui satu konteks secara keseluruhan. Salah satu poin utama dari pelaksanaan program ini adalah untuk mensinergikan kajian mengenai perbatasan yang selama ini berserak tanpa ada satu konsep bersama. Pembentukan working group mengenai isu perbatasan menjadi salah satu poin penting dalam proses knowledge mapping. Inisiasi pembentukan working group dapat dilakukan melalui beberapa langkah, salah satunya melalui serial Focus Group Discussion (FGD). Instrumen awal yang dibangun melalui kegiatan desk study, menjadi basis atau acuan dalam pelaksanaan FGD. Serial FGD digelar dengan melibatkan akademisi dan praktisi.

## **KERANGKA KAJIAN**

Kajian ini didasarkan pada perspektif yang melihat perbatasan dan kawasan perbatasan sebagai ruang yang terkonstruksi secara diskursif. Perspektif ini didasarkan pada sejumlah kesimpulan dari kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang melihat bahwa ada beragam rezim, dan bukan rezim tunggal, yang menstruktur dinamika perbatasan dan kawasan perbatasan. Secara umum di fase ini, kita bisa menggunakan pemilahan antara rezim formal dan informal untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keragaman rezim yang terlibat dalam proses diskursif konstruksi perbatasan sebagai ruang.

Istilah rezim yang kita pakai di sini pada dasarnya merujuk pada sebuah struktur pengetahuan yang terlembaga menjadi nilai, norma, aturan, dan praktek, yang disadari atau tidak, membingkai cara berpikir dan bertindak agen dari rezim tersebut. Skema ini bekerja ketika kita sadari bahwa sebuah struktur pengetahuan yang bekerjanya termanifestasi dari perilaku agennya, ternyata membingkai bagaimana

rezim pengetahuan tersebut membingkai bagaimana agen yang bersangkutan mendefinisikan realitas dan menyikapi realitas tersebut.<sup>11</sup> Berangkat dari perspektif ini pula maka istilah rezim dan pengetahuan akan digunakan secara *interchangeable* dalam laporan ini.

Secara simultan dan resiprokal, struktur rezim pengetahuan tersebut tereproduksi secara sistemik, terutama melalui pilihan-pilihan perilaku faktual dari agen dari struktur pengetahuan yang bersangkutan. Proses ini bisa kita samakan dengan tereproduksinya bahasa sebagai sebagai sebuah struktur rezim pengetahuan, yang proses reproduksi sistemiknya ditentukan oleh penuturnya. Selama ada penuturnya, bahasa tersebut akan tetap hidup.

Patut dicatat bahwa ada beragam rezim pengetahuan yang bekerja pada satu individu atau kumpulan individu. Fenomena ini seringkali dalam kajian sosiologi disebut dan dijelaskan dengan tema *cross-cutting affiliations*. Masing-masing rezim pengetahuan tersebut menempatkan masing-masing agennya dalam posisi yang secara simultan memunculkan tuntutan peran tertentu dari agen yang bersangkutan, yang sering dijelaskan dengan teori tentang *status and role*.

Karena adanya situasi *cross-cutting affiliations* tersebut ada beragam konstruksi ruang yang saling tumpang tindih. Konsekuensinya, agen yang bersangkutan harus menghadapi situasi dilematis, karena beragam status yang melekat pada dirinya seringkali menuntut implementasi peran yang berbeda bahkan tidak jarang saling berlawanan.

---

<sup>11</sup>Untuk analisa bekerjanya rezim pengetahuan dalam membentuk ruang-ruang disiplin ilmu dalam lembaga ilmu pengetahuan modern lihat Rammert, Werner, *Two Styles of Knowing and Knowledge Regimes: Condition of 'Functional Specialization' or 'Fragmental Distribution'*, Technical University Technological Studies, Working Papers, TUTS-WP-3-2004. Lihat juga Foucault, Michell, 1991, *Discipline and Punish: the Birth of a Prison*, London: Penguin

Dalam konteks permasalahan penelitian tentang *cross-border governance* yang dicermati dalam kajian ini, ada kecenderungan menempatkan rezim pengetahuan berbasis pemikiran negara bangsa untuk mendefinisikan perbatasan dan cara mengelolanya. Keberadaan rezim ini memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, begitu juga posisi dominannya. Yang menjadi permasalahan adalah asumsi yang dikembangkan dari situ cenderung secara serampangan melihat bahwa rezim pengetahuan berbasis pemikiran negara bangsa adalah satu-satunya rezim yang bekerja. Atau paling tidak, *overconfident* dengan kemampuan rezim tersebut untuk menstruktur rezim-rezim yang lain dan memperlakukan situasi tersebut sebagai sesuatu yang terberi atau *given*.

Dengan berpegang pada asumsi tersebut, menjadi wajar ketika keragaman dan realita ko-eksistensi di antara beragam rezim pengetahuan tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan. Konsekuensi lain adalah tidak pernah muncul kebutuhan akan pengetahuan tentang peta rezim pengetahuan yang secara simultan mengkonstruksi apa yang dipahami oleh publik sebagai perbatasan dan kawasan perbatasan.

Tantangan muncul ketika paradigma *governance* yang ada berubah dan menempatkan negara hanya sebagai salah satu aktor *governance* di antara aktor-aktor yang lain.<sup>12</sup> Hubungan aktor-aktor *governance* dalam paradigma baru ini juga terpola dalam struktur relasi yang relatif setara. Paradigma *governance* yang baru ini memberikan batasan yang lebih ketat bagi negara untuk menggunakan instrumen koersinya, dan

---

<sup>12</sup>Cheema, Shabir G. "Cross Border Governance in Asia: an Introduction" dalam Cheema, G. Shabbir; Christopher A. McNally, Vesselin Popovski, 2010, *Cross Border Governance in Asia: Regional Issues and Mechanisms*, Tokyo: United Nations University Press, hal. 4 – 6

men'struktur' negara untuk lebih mengedepankan strategi-strategi konsensual.

Dalam konteks kebijakan, perubahan paradigmatik ini muncul dalam transformasi paradigmatik dalam mendefinisikan dan memperlakukan perbatasan, yaitu transformasi dari paradigma *hard border* ke *soft border*.<sup>13</sup> Konsekuensi dari perubahan ini adalah keharusan untuk melihat keragaman rezim dan pengetahuan yang mengkonstruksi perbatasan secara diskursif. Jika semula pengetahuan negara bekerja sebagai rezim yang dominan, maka sekarang bagaimana perbatasan didefinisikan dan dikelola harus disepakati antara rezim pengetahuan negara dan rezim pengetahuan yang lain. Konsekuensi lebih lanjut dari situasi tersebut adalah kebutuhan untuk mengidentifikasi rezim apa saja yang bekerja dalam mengkonstruksi perbatasan dan kawasan perbatasan serta relasi struktural yang terbentuk dari dinamika interaksi antar rezim pengetahuan tersebut.

Kajian ini berusaha melakukan pemetaan rezim pengetahuan tersebut. Untuk itu, kategorisasi pengetahuan yang mengkonstruksi perbatasan dan aktifitas lintas batas yang dikemukakan oleh Brunet-Jailly digunakan sebagai salah instrumen analisa dalam penelitian ini. Konsep Brunet-Jailly menunjukkan empat kluster pengetahuan atau rezim yang mengkonstruksi perbatasan, yaitu kultur, political clout, pasar, serta institusi dan governance yang bersifat multi-level. (Lihat Figur 2.1.). Dalam konteks tata pemerintahan perbatasan dan kawasan perbatasan, Brunet-Jailly mengajukan hipotesis bahwa jika masing-masing pengetahuan atau rezim dalam kluster-kluster tersebut bisa saling

---

<sup>13</sup>Lihat Mostov, Julie, 2008, *Soft Border: Rethinking Sovereignty and Democracy*, NY: Palgrave Macmillan



mendukung atau komplementer satu sama lain maka akan terbentuk suatu kawasan perbatasan yang secara kultural muncul dan terintegrasi.

Analisa terhadap pengetahuan atau rezim yang teridentifikasi dilakukan dengan melakukan analisis diskursif. Dalam analisis diskursif ini akan diidentifikasi ruang perbatasan seperti apa yang dikonstruksikan oleh pengetahuan yang dianalisis dan struktur posisi dan peran seperti apa yang dioperasionalkan bagi agen-agensya. Dari analisis tersebut, lebih lanjut akan diidentifikasi relasi antara rezim pengetahuan tersebut dalam konteks kawasan perbatasan yang dikaji.

Untuk menghasilkan identifikasi yang lebih cermat, kajian ini berusaha melihat fenomena pengelolaan perbatasan dari kedua belah sisi perbatasan. Ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk melacak sebuah pengetahuan tertentu, yang bisa dilakukan adalah dengan melihat manifestasinya. Pengetahuan tentang pengelolaan perbatasan hanya bisa diidentifikasi melalui pengamatan terhadap manifestasinya dalam '*bordering practices*' termasuk dalam '*bordering policies*' dari kedua sisi perbatasan.<sup>14</sup>

Gagasan bahwa pemahan sosial sebagai ruang diskursif menjadi titik penting.

Tidak ada satupun wacana dan satupun sistim kategori yangmana melalui sesuatu yang riil tanpa adanya mediasi (Laclau, 2001:3).

Pemikiran Kantian tentang Marxism memproduksi sejumlah kebenaran dari postulat itu sendiri yang dapat disikapi dalam beberapa term universalitas yang melampaui ikatan kelas; hal ini rusak dengan konsepsi naturalis dari hubungan sosial, dengan mengelaborasi konsep seperti '*social a priori*', mengenalkan elemen diskursif yang ketat ke dalam

---

<sup>14</sup>Brunet-Jaily, Emmanuel, "Special Section: Border, Borderlands, and Theory: an Introduction" dalam *Geopolitics* 16:1, hal. 1-6, <http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2010.493765>, hal.3

konstitusi objektivitas sosial; dan pada akhirnya, itu memungkinkan Marxis untuk memahami infrastruktur sebagai medan yang konformasinya tergantung pada bentuk kesadaran, dan bukan pada gerakan naturalistik kekuatan-kekuatan produksi.

Sejak upaya perjuangan membawa bentuk dari artikulasi yang tidak pada waktu itu secara spontan hasil dari hukum kapitalisme, itu merupakan kebutuhan untuk memperkenalkan sebuah logika sosial yang berbeda dari determinisme mekanik—yakni, sebuah ruang yang akan mengembalikan otonomi inisiatif politik. Meskipun minimal, ruang ini hadir dalam Kautsky: ia terdiri dari hubungan-hubungan eksterioritas, antara kelas pekerja dan sosialisme, yang memerlukan mediasi politik dari para intelektual. ruang ini tentunya lebih luas untuk tendensi tersebut, dalam rangka untuk mengatasi keterbelahan antara praktik-praktik dari hari ke hari dan tujuan akhir, tuntutan paling berat untuk memecah dengan kepasifan dan untuk meneruma efek politik kini. (25)

Spesifikasi dari lepasnya mata rantai politik dari rentetan kebutuhan; tidak dapat berkurangnya ruang politik; yang dalam Kautsky dibatasi untuk memediasi peran para kaum terpelajar, muncul di sini dengan sangat luas.

Bagaimana konsep hegemoni disusun. Dalam tulisan Plekhanov dan Axelrod, istilah hegemoni diperkenalkan untuk mendeskripsikan proses berjalannya lemahnya borjuis Rusia untuk membawa melalui kekuatan normal untuk kemerdekaan politik melawan kelas pekerja untuk campur tangan secara tegas untuk mencapainya. Meskipun demikian, terdapat perpecahan antara class nature of the task dan agen sejarah yang melaksanakannya. Hal ini menciptakan sebuah ruang ketidakpastian yang dimensinya tidak pasti. Tetapi pada beberapa kejadian, ruang ini tidak menjadi poin krusial dari pembagian beberapa

orientasi yang revolusioner. Revolusi Rusia telah membenarkan strategi dengan memperluas kekuatan hingga batas maksimal ruang karakteristik ketidakpastian untuk menghegemoni. Konsekuensinya, sebuah oposisi meningkat antara necessary interior (timbang balik pada tugas-tugas kelas pada sebuah pembangunan normal) dan contingent exterior (gesekan antara tugas-tugas asing untuk kelas dasar dari agen sosial yang mereka asumsikan pada given moment). (49)

Kenyatannya, hegemoni menunjukkan, lebih dari sebuah hubungan, sebuah ruang didominasi oleh tegangan antara dua hubungan yang sangat berbeda: a) tugas yang terhegemoni dan agen kelas 'natural'; dan b) bahwa tugas yang terhegemoni dan kelas yang menghegemoninya. Jika koeksistensi dari dua hubungan tersebut di bawah bentuk-bentuk konseptual yang tidak tepat cukup untuk memberi istilah hegemoni sebuah ruang referensial, penentuan tepat dari artikulasi logis mereka adalah *sin qua non* untuk konversi hegemoni ke dalam kategori teoritis.

Perhitungan pemikir-pemikir Komunis dalam sebuah dikotomi ruang yang membangun antagonisme antara sektor dominan dan populer; dan identitas dari keduanya merupakan konstruksi yang berbasis pada perhitungan sektor-sektor kelas perhitungan mereka. (63)

Logika dekonstruktif hegemoni Gramsci menegaskan bahwa hegemoni harus selalu sesuai dengan kelas ekonomi fundamental tidak semata-mata untuk menegaskan kemabli determinasi oleh ekonomi; hal ini juga untuk mengatakan bahwa, sejauh perekonomian merupakan suatu batas yang dapat diatasi dengan potensi masyarakat untuk rekompresi hegemonik, logika konstitutif ruang ekonomi bukanlah hegemonik itu sendiri. Disinialh hukum naturalistis, yang melihat ekonomi sebagai ruang homogen yang dipersatukan oleh hukum-hukum keutuhan, muncul sekali lagi dengan seluruh kekuatannya. (69)